

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

TGUPP Diselimuti Kegaduhan

Marco Kusumawijaya Mengundurkan Diri

JAKARTA – Kalangan politisi di DPRD DKI Jakarta berkomentar soal mundurnya Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Bidang Pengelolaan Pesisir Marco Kusumawijaya. Ditengarai, mundurnya Marco akibat kegaduhan di public terhadap tim bentukan Gubernur Anies Baswedan itu.

Anggota DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua menyatakan, keberadaan TGUPP bentukan Anies selalu jadi sorotan DPRD DKI. Misalnya, saat pembahasan rancangan anggaran 2020 yang dimulai dengan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Dia menyatakan, memang belum melihat kinerja anggota TGUPP. "Selama ini kami belum melihat kinerja yang optimal yang dilakukan TGUPP. Ini juga perlu pertimbangan," ujar politisi Partai Gerindra itu kepada INDO-POS di DPRD

DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019). TGUPP, sambung Inggard, menjadi topik pembicaraan Komisi A (bidang aparatur) DPRD DKI Jakarta saat rapat membahas rancangan KUA-PPAS pada 30 Oktober 2019.

Kondisi demikian dibenarkan Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyatakan, para kepala dinas atau satuan kerja perang-

kat daerah (SKPD) DKI sangat takut kepada anggota TGUPP. "Sudah kerja tidak optimal, anggarannya pun besar. Makanya kita pangkas," ucap dia.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono meminta anggaran TGUPP dinolkan dari pos anggaran Bappeda. Yang teranyar, adanya anggota TGUPP yang merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas (komisari) di tujuh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan menerima gaji double telah membuat gaduh.

"Anggota Banggar DPRD DKI ra-

mai-ramai mengkritik soal itu dalam rapat pembahasan RAPBD 2020 pada Senin (9/12) lalu. Mereka meminta anggota TGUPP yang rangkap jabatan, diberhentikan. Dalam rapat itu, anggaran Rp 19,8 miliar untuk TGUPP juga menuai pro-kontra. Ada yang meminta anggaran itu tetap dialokasikan pada pos Bappeda di

dalam RAPBD, ada pula yang meminta anggaran dicoret dan dialihkan menggunakan dana operasional gubernur. Pada akhirnya, pimpinan Banggar memutuskan untuk memangkas anggaran serta anggota TGUPP," papar dia.

Seperti diketahui, Ketua TGUPP DKI Jakarta Bidang Pengelolaan Pesisir Marco Kusumawijaya mengundurkan diri. Pengunduran diri itu sejak 1 Desember 2019 lalu. "Sudah mengundurkan diri sejak 1 Desember," kata Plt Kepala Bappeda DKI Suharti kepada

wartawan, Selasa (10/12/2019).

Ia menjelaskan, alasan Marco dari jabatannya karena yang bersangkutan ingin fokus sebagai penulis. "Info ke saya, akan fokus tulis buku," ungkap dia. Namun, Suharti memastikan anggaran untuk TGUPP pada 2020 tidak dipotong. Anggaran yang dialokasikan tetap Rp19,8 miliar sesuai dengan yang diajukan Pemprov DKI Jakarta dalam Rancangan APBD 2020.

Suharti menegaskan, hanya jumlah anggota TGUPP DKI yang dikurangi, dari 67 menjadi 50 orang. Jumlah anggota TGUPP yang dikurangi juga sudah diketuk palu oleh DPRD DKI Jakarta. "Kalau anggaran kan tidak dipotong, keanggotaannya yang dipotong," kata Suharti.

Nantinya, akan ada perubahan Surat Keputusan (SK) terkait penyesuaian tersebut. Pelaksanaan dan tugas TGUPP tergantung keputusan Gubernur Anies Baswedan ke depan. "Nah itu nanti pelaksanaannya sesuai dengan SK Gubernur saja. Tidak berubah. Kan kemarin tidak dibahas," jelas dia. (aen)

“

Selama ini kami belum melihat kinerja yang optimal yang dilakukan TGUPP”.

Inggard Jhosua
Anggota DPRD DKI Jakarta